

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Wilayah

a. Kondisi Lingkungan dan Geografi

Kota Yogyakarta merupakan salah satu Kota dari 5 kabupaten/ kota yang ada di Propinsi Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Adipati Pakualam. Kota Yogyakarta telah terintegrasi dengan sejumlah kawasan disekitarnya, sehingga batas- batas administrasi sudah tidak terlalu menonjol. Untuk menjaga keberlangsungan pengembangan kawasan ini, dibentuklah sekretariat bersama yang mengurus hal yang berkaitan dengan kawasan aglomerasi Yogyakarta dan daerah-daerah penyangga. Adapun Kota Yogyakarta mempunyai batasan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Mlati dan Kecamatan Depok, serta Kabupaten Sleman.

Sebelah Timur: Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

Sebelah Selatan: Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Kasihan, serta Kabupaten Bantul.

Sebelah Barat : Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dan Kecamatan Kasihan, serta Kabupaten Bantul.

Wilayah Kota Yogyakarta berada pada bentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15' 24''$ sampai $7^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Bentang alam Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan 1 derajat. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 489.000 jiwa (data per Desember 1999) dengan kepadatan rata-rata 15.000 jiwa/Km persegi.

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (*fluvia vulcanic foot plain*) yang garis besarnya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda Sejalan dengan perkembangan Perkotaan dan Pemukiman yang pesat, lahan pertanian Kota setiap tahun mengalami penyusutan.

Secara aksesibilitas, Kota Yogyakarta berada pada daerah yang strategis. Kota Yogyakarta begitu dekat dengan akses untuk umum, seperti taman rekreasi, pertokoan, supermarket, pasar, dan angkutan umum. Dengan kondisi yang strategis ini maka memudahkan setiap orang untuk melakukan kegiatan. Disamping warga asli ada pula wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke Kota Yogyakarta karena akses ke setiap penjuru mudah dan terjangkau.

Kota Yogyakarta terbagi dalam 14 Kecamatan, 14 Kecamatan tersebut antara lain:

- 1) Kecamatan Danurejan
- 2) Kecamatan Gedong Tengen
- 3) Kecamatan Gondokusuman
- 4) Kecamatan Jetis
- 5) Kecamatan Gondomanan
- 6) Kecamatan Kotagede
- 7) Kecamatan Kraton
- 8) Kecamatan Mantrijeron
- 9) Kecamatan Mergangsan
- 10) Kecamatan Ngampilan
- 11) Kecamatan Pakualaman
- 12) Kecamatan Tegal Rejo

13) Kecamatan Umbul Harjo

14) Kecamatan Wirobrajan

b. Kondisi Sosial Penduduk

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 2010 berjumlah 388.088 Jiwa, dengan perbandingan prosentase antara laki- laki dan perempuan seimbang. Agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta adalah islam. Sedangkan pemeluk agama lain seperti Katolik, Protestan, Hindhu, Budha, dan Kong Hucu tidak terlalu banyak yaitu hanya 2 % dari total penduduk Kota Yogyakarta.

Kegiatan ekonomi warga Kota Yogyakarta sebagian besar adalah di bidang perniagaan, perkantoran, dan pariwisata. Adapun tingkat pendidikan penduduk Kota Yogyakarta mayoritas Sarjana atau perguruan tinggi.

2. Deskripsi tentang Aisyiyah

a. Profil Aisyiyah

Organisasi Aisyiyah merupakan organisasi otonom di bawah Muhammadiyah. Aisyiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan tanggal 27 Rajab 1335 H/ 19 Mei 1917. Profil Aisyiyah dapat dijelaskan melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

1) Nama, Pendirian, dan Tempat Kedudukan

- a) Organisasi ini bernama Muhamamdiyah, Aisyiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 27 Rajab 1335 H/ bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 untuk waktu yang tidak terbatas.
 - b) Aisyiyah berkedudukan di Yogyakarta.
- 2) Identitas, Status, dan Lambang
- a) Aisyiyah adalah organisasi perempuan persyarikatan Muhamamdiyah merupakan gerakan Islam, dakwah *amar makruf nahi munkar* dan *tajdid*, yang berdasar Islam serta bersumber kepada Al- qur'an dan As-Sunah.
 - b) Aisyiyah adalah organisasi otonom khusus persyarikatan Muhammadiyah. Organisasi otonom khusus adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya anggota Muhammadiyah dan diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah.
 - c) Lambang Aisyiyah adalah matahari bersinar dua belas ditengah bertuliskan Aisyiyah yang dilingkari kalimat *Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allah* dengan huruf arab.
- 3) Tujuan dan Usaha
- a) Tegaknya agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar- benarnya .

b) Usaha untuk mencapai tujuan tersebut, Aisyiyah melakukan dakwah *amar makruf nahi munkar* dan *tajdid* disegala bidang kehidupan, Usaha Aisyiyah diwujudkan dalam program, pelaksanaannya dalam bentuk amal usaha dan kegiatan, penentu kebijakan dan penanggung jawab program, amal usaha dan kegiatan Aisyiyah.

4) Keanggotaan

a) Anggota Aisyiyah adalah anggota Muhammadiyah Perempuan yang berusia 17 tahun atau sudah menikah.

b) Tata cara penerimaan anggota diatur dalam anggaran rumah tangga.

5) Hak dan Kewajiban Anggota

Hak dan kewajiban anggota diatur dalam anggaran rumah tangga.

6) Identitas

a) Lambang Aisyiyah sebagaimana telah disebutkan dalam anggaran dasar.

b) Bendera Aisyiyah berbentuk persegi panjang berukuran 2 berbanding 3, bergambar lambing Aisyiyah di tengah dan tulisan AISYIYAH di bawahnya, berwarna dasar hijau dengan tulisan dan gambar berwarna putih.

7) Susunan organisasi, pendirian, dan penetapan organisasi

a) Susunan Organisasi

Susunan organisasi Aisyiyah terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu:

- 1) Susunan organisasi Aisyiyah terdiri dari : Ranting, Cabang, Daerah, wilayah, dan pusat.
- 2) Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan.
- 3) Cabang ialah kesatuan ranting dalam satu tempat.
- 4) Daerah ialah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten.
- 5) Wilayah ialah kesatuan daerah dalam satu propinsi.
- 6) Pusat ialah kesatuan wilayah dalam Negara.

b) Pendirian dan penetapan organisasi

- 1) Pendirian wilayah dan daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan pusat.
- 2) Pendirian cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan wilayah.
- 3) Pendirian ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan daerah.
- 4) Dalam hal-hal luar biasa, pimpinan pusat dapat mengambil ketetapan lain.

c) Struktur Pimpinan

Struktur pimpinan organisasi terdiri dari:

- 1) Pimpinan Pusat
- 2) Pimpinan Wilayah
- 3) Pimpinan Daerah
- 4) Pimpinan Cabang
- 5) Pimpinan Ranting

8) Permusyawaratan

a) Sahnya Musyawarah

1) Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari anggota musyawarah yang telah diundang secara sah.

2) Apabila peserta belum mencapai dua pertiga, musyawarah tetap berlangsung. Untuk pengesahan musyawarahnya menunggu sampai terpenuhi dua pertiga dari anggota musyawarah yang diundang. Apabila sampai akhir musyawarah jumlah anggota yang hadir tidak mencapai dua pertiga yang diundang, maka sah atau tidaknya permusyawaratan ditentukan oleh kebijakan pimpinan organisasi.

b) Keputusan Musyawarah

1) Keputusan Musyawarah diutamakan dengan cara mufakat.

2) Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.

3) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup/ rahasia.

9) Kekayaan

1) Kekayaan organisasi adalah semua harta yang berupa uang, surat berharga, asset tetap (benda bergerak, benda tidak bergerak) yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan program, amal usaha dan kegiatan Aisyiyah.

2) Seluruh kekayaan organisasi, termasuk kekayaan Badan Pembantu Pimpinan, Amal Usaha pada semua tingkatan, secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Organisasi. Pemindahan hak untuk benda bergerak dilakukan atas izin tertulis Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

10) Sumber Keuangan

1) Uang pangkal dan uang iuran:

a) Uang pangkal pendirian organisasi dan uang pangkal anggota ditentukan oleh Pimpinan Pusat.

b) Uang iuran anggota organisasi ditentukan oleh musyawarah cabang, setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah.

2) Dana wajib organisasi dibayarkan organisasi dibayarkan setahun sekali oleh Pimpinan Cabang.

a) Jumlah ditetapkan oleh Tanwir

b) Pembagian ditentukan sebagai berikut:

50% untuk Pimpinan Pusat Aisyiyah

30% untuk Pimpinan Wilayah Aisyiyah

20% untuk Pimpinan Daerah Aisyiyah

3) Dana Amal Usaha diatur oleh Pimpinan Pusat.

4) Dana dari pemerintah, perorangan, pihak lain dalam dan/ luar negeri, yang tidak mengikat.

11) Pengelolaan Keuangan

1) Pengelolaan keuangan organisasi dilakukan dengan sistem anggaran pendapatan dan belanja organisasi, aturannya ditetapkan oleh pimpinan pusat.

2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi dibuat setiap tahun oleh pimpinan organisasi.

12) Pengelolaan Inventaris

- 1) Pengelolaan inventaris organisasi dilaksanakan dengan sistem pencatatan inventaris, aturannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- 2) Pencatatan inventaris dibuat secara berkelanjutan oleh Pimpinan Organisasi.

13) Pengawasan Kekayaan

- 1) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan inventaris organisasi, Badan Pembantu Pimpinan, dan Amal Usaha dilakukan oleh pimpinan organisasi minimal satu tahun sekali.
- 2) Aturan pengawasan ditetapkan oleh Pimpinan organisasi.

14) Struktur Organisasi Aisyiyah

Pimpinan Pusat Aisyiyah

Pimpinan Wilayah Aisyiyah

Pimpinan Daerah Aisyiyah

Pimpinan Cabang Aisyiyah

Pimpinan Ranting Aisyiyah

15) Daftar Nama Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah dari Periode ke Periode:

No	Ketua PPA	Periode
1	Ibu Bariyah	1917
2	Ibu Bariyah	1918
3	Ibu Bariyah	1919
4	Ibu bariyah	1920
5	Nyai Ahmad Dahlan	1921
6	Nyai Ahmad Dahlan	1922
7	Nyai Ahmad Dahlan	1923
8	Nyai Ahmad Dahlan	1924
9	Nyai Ahmad Dahlan	1925
10	Nyai Ahmad Dahlan	1926
11	Ibu Bariyah	1927
12	Ibu Bariyah	1928
13	Ibu Bariyah	1929

14	Nyi Ahmad Dahlan	1930
15	Ibu Aisyah	1931
16	Ibu Munjilah	1932
17	Ibu Munjilah	1933
18	Ibu Munjilah	1934
19	Ibu Munjilah	1935
20	Ibu Munjilah	1936
21	Ibu Aisyah	1937
22	Ibu Badilah	1938
23	Ibu Aisyah	1939
24	Ibu Aisyah	1940
25	Ibu Aisyah	1941
26	Ibu Aisyah	1944
27	Ibu Hayinah	1946
28	Ibu Aisyah	1950

29	Ibu Hayinah	1953
30	Ibu Hayinah	1956
31	Ibu Hayinah	1959
32	Ibu Hayinah	1962
33	Ibu Baroroh	1965
34	Ibu Baroroh	1968
35	Ibu Baroroh	1971
36	Ibu Baroroh	1974
37	Ibu Baroroh	1978
38	Ibu Elyda	1985
39	Ibu Elyda	1990
40	Ibu Elyda	1995
41	Ibu Chamamah	2000
42	Ibu Chamamah	2005
43	Ibu Noordjannnah Dj	2010

Sumber: Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aisyiyah.

b. Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta

1) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta berdiri pada tahun 1958 dimana pada saat itu bertepatan dengan Mukhtamar Muhammadiyah yang ke- 34 di Yogyakarta. Kepengurusan Pimpinan Daerah Aisyiyah periode 2010- 2015 menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

a) Pengurus Harian dan inti

Ketua	: Himmatus Sudja'ah
Wakil ketua I	: Siti Badilah
Wakil Ketua II	: Sri Suratun
Sekretaris	: Listiana Ambarsari
Wakil Sekr I	: Siti Zuchriyah
Wakil Sekr II	: Suyamtini
Bendahara	: Eny Harjanti
Wakil Bend I	: Uswatun Chasanah
Wakil Bend II	: Asfiyah

b) Majelis- Majelis

- 1) Majelis Tabligh : Ruslaini
- 2) Majelis Dikdasmen : Badriatul ‘Aini
- 3) Majelis Ekonomi : Sri Uji Setyaningsih
- 4) Majelis Kader : Sri Istifada
- 5) Majelis Kesehatan : Erciana Mahmudah
- 6) Majelis Kesos : Siti Wardani
- 7) Majelis Hukum dan HAM : Zubaidah Nasucha

c) Lembaga

Lembaga Kebudayaan : Subiyantini

2) Organisasi

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta secara struktural membawahi kepengurusan Pimpinan Cabang Aisyiyah dan Pimpinan Ranting Aisyiyah. Jumlah kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Yogyakarta yaitu terdiri dari 14 Kecamatan dan 14 Kelurahan, sehingga Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta membawahi 14 Cabang dan 128 Ranting.

3. Inventaris yang ada pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta

Pada Pimpinan Pusat Aisyiyah Kota Yogyakarta, Sekretariat Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta yaitu berada di komplek gedung PDM Kota Yogyakarta lantai 2 sayap Timur. Beberapa fasilitas/inventaris yang ada pada Pimpinan Daerah Aisyiyah sudah cukup memadai, dimana terdapat komputer, printer, kipas angin, lemari, bindex, papan tulis, papan pengumuman. Selain itu, juga terdapat perpustakaan milik Pimpinan Daerah Aisyiyah yang masih menginduk tempatnya dengan perpustakaan PDM Kota Yogyakarta. Beberapa inventaris tersebut menggunakan atau memanfaatkan dana yang berasal dari pusat.

Fasilitas- fasilitas ini diberikan secara gratis bertujuan guna membantu proses jalannya kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta dan program- program yang sudah ditetapkan. Pemanfaatan fasilitas ini tentunya dipengaruhi oleh kecermatan setiap anggota Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta.

4. Deskripsi Data Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek peneliti adalah anggota Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta baik itu yang menjabat sebagai ketua maupun ketua majelis yang ada pada Pimpinan Daerah

Aisyiyah Kota Yogyakarta. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang dapat dijadikan sampel yang dianggap mewakili populasi yang berjumlah 8 sampel. Melalui informan tersebut, peneliti sudah memperoleh informasi yang dibutuhkan dan informasi tersebut telah mengalami data jenuh. Data informan yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

a. Ibu HS

Ibu HS berumur 68 tahun dan pendidikan terakhir adalah IAIN Sunan Kalijaga. Beliau berasal dari Kabupaten Pacitan. Sekarang beliau tinggal di Pathuk, Yogyakarta. Pekerjaan beliau saat ini adalah berdagang di pasar Pathuk. Beliau mulai aktif di Aisyiyah sejak tahun 1970. Pada kepengurusan periode sebelumnya beliau menjabat sebagai wakil ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah dan pada kepengurusan periode sekarang beliau menjadi Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah.

b. Ibu WAM

Ibu WAM berumur 54 tahun dan pendidikan terakhir beliau adalah Universitas Terbuka. Beliau asli dari Yogyakarta. Sekarang beliau tinggal di Wirobrajan. Beliau mulai aktif di Aisyiyah tahun 1998. Pada kepengurusan periode sekarang beliau menjabat sebagai anggota Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta serta menjabat sebagai Ketua PCA Wirobrajan.

c. Ibu SB

Ibu SB berusia 70 tahun dan pendidikan terakhirnya adalah sarjana muda, beliau asli dari Kota Yogyakarta. Beliau aktif di Aisyiyah sejak tahun 1970. Pada periode 2010-2015 beliau menjabat sebagai Wakil Ketua I.

d. Ibu LST

Ibu LST berusia 44 tahun dan pendidikan terakhirnya adalah D3 (dalam proses S 1), beliau berasal dari Kota Yogyakarta, beliau aktif di Aisyiyah sejak tahun 1994. Pada kepengurusan periode ini beliau menjabat sebagai Sekretaris.

e. Ibu NA

Ibu NA berusia 43 tahun dan pendidikan terakhirnya adalah sarjana, beliau berasal dari kota Yogyakarta, beliau aktif di Aisyiyah mulai tahun 2006. Pada kepengurusan periode ini beliau menjabat wakil sekretaris Majelis DIKDASMEN.

f. Ibu SS

Ibu SS berusia 57 tahun dan pendidikan terakhirnya adalah sarjana S-1, beliau berasal dari kota Yogyakarta. Beliau aktif di Aisyiyah mulai tahun 1998. Pada kepengurusan periode ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua II Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta

g. Ibu RI

Ibu RI berusia 45 tahun dan pendidikan terakhirnya sarjana, beliau berasal dari Kota Yogyakarta. Beliau aktif di Aisyiyah mulai tahun 2000. Pada kepengurusan periode ini beliau menjabat sebagai Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta.

h. Ibu EH

Ibu EH berusia 47 tahun dan pendidikan terakhirnya adalah S-1. Beliau bersal dari Kota Yogyakarta. Beliau aktif di Aisyiyah mulai tahun 2007. Pada kepengurusan periode ini beliau menjabat sebagai Bendahara Umum Pimpinan Daerah Aisyiyah.

i. Ibu BA

Ibu BA berusia 52 tahun dan pendidikan terakhirnya adalah S-1. Beliau berasal dari Kota Yogyakarta. Beliau aktif di Aisyiyah mulai tahun 2005. Pada kepengurusan periode ini beliau menjabat sebagai Majelis DIKDASMEN Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta.

j. Ibu ZN

Ibu ZN berusia 46 tahun dan pendidikan terakhirnya adalah S-1 beliau berasal dari Kota Yogyakarta. Beliau aktif di Aisyiyah sejak tahun

2007, saat ini beliau menjabat pada Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta.

B. Data Hasil Penelitian dan Analisis

1. Kedudukan Aisyiyah dalam Organisasi Muhammadiyah

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan yaitu seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya (Soerjono Soekanto, 2005:223). Peranan mempunyai dua arti, yaitu peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk menjalankan peran yang dimilikinya. Lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk melaksanakan peranan. Perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan perubahan fasilitas peranan (Soerjono Soekanto, 2005:224).

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat

(*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Peran yang dijalankan merupakan penjabaran dari kedudukan yang melekat pada setiap individu. Peran ini diselaraskan dengan tujuan yang akan dicapai. Peran kesetaraan gender Aisyiyah Kota Yogyakarta untuk melihat tentang sejauh mana peran serta perempuan Muhammadiyah untuk secara aktif dapat menduduki jabatan dalam Muhammadiyah.

Peran kesetaraan gender Aisyiyah dalam Muhammadiyah yaitu bagaimana peran dari perempuan Muhammadiyah terutama dalam Aisyiyah untuk terlibat secara proporsional dalam Muhammadiyah dan keterlibatan yang sesuai dalam setiap agenda Muhammadiyah. Hal ini terlihat dalam setiap kegiatan yang ada pada Muhammadiyah serta dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut persyarikatan Muhammadiyah. Hasil ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh pengurus Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta yaitu Ibu HS selaku ketua PDA Kota Yogyakarta yang ikut serta dalam menjalankan setiap program- program yang ada, yaitu: “Aisyiyah merupakan organisasi perempuan persyarikatan Muhammadiyah yang statusnya adalah otonom khusus. Sehingga seluruh anggota dan kegiatan amal usaha lainnya ditetapkan oleh Muhammadiyah” (Wawancara dengan Ibu HS pada tanggal 8 Desember 2012, Pukul 13.30 WIB).

Dari pernyataan informan diatas dapat diketahui bahwa peran Aisyiyah dalam kegiatan Muhammadiyah merupakan bentuk dari pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa dalam menjalankan kegiatan telah mengedepankan kesetaraan gender bisa dilihat dari partisipasi Aisyiyah di dalamnya yaitu dengan kegiatan amal usaha yang ada.

Hal senada diungkapkan oleh Ibu WAM bahwa kegiatan- kegiatan yang ada pada Muhamadiyah telah menunjukkan adanya kesetaraan gender dengan diikutkannya Aisyiyah di dalamnya walaupun tidak mutlak. Pernyataannya sebagai berikut: “Aisyiyah merupakan persyarikatan perempuan Muhammadiyah jadi segala aspek yang ada bisa disergikan sehingga dalam setiap kegiatan kami pun bisa secara aktif ikut serta didalamnya karena kami adalah organisasi otonom dari mereka” (Wawancara dengan Ibu WAM tanggal 8 Desember 2012, Pukul 13.45 WIB).

Berdasarkan pernyataan kedua informan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan peran kesetaraan gender dalam kegiatan Muhammadiyah dapat dilaksanakan walau dalam praktiknya masih belum secara keseluruhan, dan masih ada yang harus di selaraskan antara kegiatan yang ada di Muhammadiyah dan Aisyiyah.

Pergeseran paradigma menegaskan bahwa untuk memajukan perempuan diperlukan lebih dari sekedar mengintegrasikan mereka dalam

pembangunan, tetapi yang utama adalah mengubah pola relasi gender yang merugikan perempuan bahwa diberikan dan diakuinya keterlibatan perempuan dalam jantung kendali masyarakat, yaitu posisi penentu dalam pengambilan keputusan dari setiap kebijakan baik di legislatif atau eksekutif (Asyari, 2008:103).

Selanjutnya yang menarik adalah ketika menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan, dimana pada saat sidang pleno atau memusyawarahkan suatu agenda pendapat perempuan terutama dari Aisyiyah. Hal ini tentunya sangat memberikan kesempatan kepada perempuan khususnya Aisyiyah agar dapat menyatakan pendapatnya dalam setiap pengambilan keputusan di Muhammadiyah.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pengurus yaitu Ibu SB yang menyatakan sebagai berikut:

“ ya, karena kita juga termasuk bagian dari Muhammadiyah sehingga kita pun selalu diperhatikan terutama dalam pengambilan keputusan walaupun kami rasa masih begitu sulit bagi kami untuk bisa secara mutlak dalam proses pengambilannya terlebih lagi kami berkedudukan pada jajaran Kota, namun secara keseluruhan kita dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan” (Wawancara dengan Ibu SB pada tanggal 8 Desember 2012, Pukul 14.30 WIB).

Dari pernyataan Ibu SB dapat diketahui bahwa dalam pengambilan keputusan, keterlibatan perempuan dari Aisyiyah diperhatikan baik dalam rapat pleno, rapat harian, atau dalam menentukan arah gerakan Muhammadiyah.

Hal serupa juga disebutkan oleh Ibu LST yang menyatakan sebagai berikut:

“ ya,dengan selalu memberikan porsi khusus kepada Aisyiyah. Kebijakan serta arah gerakan Muhammadiyah didasarkan atas seluruh pendapat dari semua anggota persyarikatan Muhammadiyah dalam setiap rapat pleno serta musyawarah yang ada, sehingga semua dapat menyatakan pendapat, itulah mengapa dari Aisyiyah harus diberikan porsi khusus” (Wawancara dengan Ibu LST tanggal 14 Desember 2012, Pukul 13.40 WIB).

Dari pendapat Ibu LST menyatakan bahwa pendapat perempuan dari Aisyiyah diperhatikan yaitu dengan memberikan porsi khusus dalam setiap pengambilan keputusan yang bersifat internal dalam Muhammadiyah.

Selain dari pendapat Ibu LST, Ibu NA juga berpendapat demikian, sebagai berikut: “ ya mas, sebab adanya hak berpendapat dan kewajiban menghormati pendapat Islam sendiri juga telah mengajarkan demikian dan Negara pun sudah mengaturnya” (Wawancara dengan Ibu NA tanggal 14 Desember 2012, Pukul 14.35 WIB).

Jika dilihat dari aspek gender dari berbagai pendapat diatas, hal tersebut bisa dikaitkan dengan peran gender dalam organisasi. Peran tersebut telah sejalan dengan gerakan kesetaraan gender yang sedang digencarkan. Aisyiyah dengan kapasitasnya sebagai organisasi otonom Muhammadiyah terus meningkatkan perannya agar dapat berperan dalam pengambilan keputusan serta berperan aktif dalam setiap agenda dan kegiatan Muhammadiyah. Disamping pendapat Ibu NA, ada juga pendapat

dari Ibu SS, yaitu sebagai berikut: “ ya mas, karena kita itu kan bagian dari Muhammadiyah yang berdiri secara otonom, jadi pendapat kita selalu diperhatikan, walaupun dalam pengambilan keputusan terkadang kita kurang dilibatkan” (wawancara dengan Ibu SS tanggal 4 Januari 2013, Pukul 13.30 WIB).

Dari berbagai pendapat diatas, bahwa kedudukan dari organisasi Aisyiyah dalam organisasi Muhammadiyah begitu penting. Kedudukan Aisyiyah Kota Yogyakarta dalam organisasi Muhammadiyah adalah sebagai mitra dalam setiap kegiatan. Mitra tersebut juga terlihat pada saat pengambilan keputusan dimana perempuan diberikan porsi khusus untuk ikut dalam pengambilan keputusan. Kedudukan Aisyiyah dalam organisasi Muhammadiyah akan memberikan dampak bagi perempuan Muhammadiyah untuk masuk dalam kepengurusan Muhammadiyah tanpa adanya rasa enggan atau kurang percaya diri guna berkiprah pada kepengurusan Muhammadiyah.

2. Kesetaraan Gender dalam Pandangan Aisyiyah

Kegiatan atau jalannya organisasi di dalam Aisyiyah menimbulkan pandangan terhadap kesetaraan gender. Pandangan ini timbul karena adanya potensi serta hak dan kewajiban yang sama antara laki- laki di Muhamamdiyah dan perempuan di Aisyiyah untuk berperan aktif dalam

memperoleh prestasi di Muhammadiyah dan dapat menduduki jabatan tertentu di Muhammadiyah.

Dalam buku Mufidah Ch bahwa Kesetaraan gender merupakan posisi yang sama antara laki- laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik keluarga, masyarakat dan bernegara. Keadilan gender merupakan proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, dan tanpa diskriminasi (Mufidah Ch, 2008:12). Hal ini disampaikan oleh Ibu HS beliau menyatakan bahwa:

“ Dalam pandangan Aisyiyah antara laki- laki sama- sama mempunyai potensi untuk meraih prestasi dan kesuksesan, karena keduanya sebagai khalifah hamba Allah SWT, yang mempunyai kedudukan setara, dan mempunyai fungsi ibadah, beriman, dan beramal shaleh” (Wawancara dengan Ibu HS tanggal 8 Desember 2012, Pukul 13.30 WIB).

Dari pendapat Ibu HS bahwa pandangan gender menurut Aisyiyah adalah pemberian porsi yang sama antara laki- laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam masyarakat atau dalam organisasi seperti dalam Muhammadiyah. Kesetaraan gender ada dalam kehidupan organisasi persyarikatan Muhammadiyah yang telah melaksanakan kesetaraan gender walau belum maksimal. Hal senada juga disebutkan oleh Ibu NA yang menyatakan sebagai berikut: “cukup proporsional” (Wawancara dengan Ibu NA tanggal 14 Desember 2012, Pukul 14.35 WIB).

Dari pendapat Ibu NA kesetaraan gender dalam pandangan Aisyiyah sudah cukup proporsional, hal ini dapat dilihat dari setiap agenda atau kegiatan yang diadakan oleh persyarikatan Muhammadiyah telah mengikutsertakan perempuan untuk masuk sebagai pengurus atau panitia yang menggambarkan adanya kesetaraan gender walau belum proporsional. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Ibu RI, yaitu sebagai: “dalam pandangan Aisyiyah kesetaraan gender adalah kesamaan untuk memperoleh porsi terutama dalam struktur Muhammadiyah” (Wawancara dengan Ibu RI tanggal 4 Januari 2013, Pukul 15.35 WIB).

Selain itu juga ada pendapat Ibu SB, beliau menyatakan tentang pandangan kesetaraan gender dalam pandangan Aisyiyah sebagai berikut: “Surat An- Nahl ayat 97”(Wawancara dengan Ibu SB, Tanggal 8 Desember 2012, Pukul 14.30 WIB).

Dari pendapat Ibu SB bahwa kesetaraan gender dalam pandangan Aisyiyah adalah berdasarkan dari surat An- Nahl ayat 97, menurut Ibu SB bahwa Aisyiyah dengan motif geraknya membawa kesadaran beragama dan berorganisasi berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam surat AN- Nahl ayat 97 yang artinya bahwa setiap laki- laki dan perempuan mempunyai potensi untuk melakukan hal kebajikan.

Berdasarkan keempat pendapat dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender dalam pandangan Aisyiyah yaitu pemberian porsi yang setara dan proporsional antara laki- laki dan

perempuan terutama dalam persyarikatan Muhammadiyah karena keduanya merupakan ciptaan Allah SWT yang sama-sama mempunyai peran untuk meraih prestasi sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97.

Pandangan tentang kesetaraan gender ini telah melahirkan adanya peran dalam organisasi Muhammadiyah sehingga perempuan khususnya Aisyiyah dapat diberikan porsi khusus di persyarikatan Muhammadiyah. Dengan pemberian porsi khusus ini tentunya melalui beberapa pertimbangan yang nantinya dapat menyelaraskan proporsi peran Aisyiyah. Dengan adanya pandangan tentang kesetaraan gender ini maka Aisyiyah mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan kepada Muhammadiyah terkait dengan arah gerakan dari Muhammadiyah.

Porsi khusus yang diberikan maka akan berdampak positif bagi Aisyiyah terutama pada Pimpinan Daerah Aisyiyah. Koordinasi yang dilakukan dari tingkat pusat hingga ranting menjadikan peranan gender dalam Muhammadiyah menjadi semakin kuat. Keterwakilan dari beberapa struktur dari Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting memudahkan peran perempuan untuk ada dalam setiap kegiatan atau agenda Muhammadiyah.

Pendapat dari Ibu EH memperkuat tentang pandangan kesetaraan gender menurut Aisyiyah, yaitu: “kesetaraan gender dalam pandangan Aisyiyah yaitu bagaimana mampu menempatkan porsi serta proporsi bagi

perempuan khususnya dalam organisasi dalam hal ini persyarikatan Muhammadiyah”(Wawancara dengan Ibu EH tanggal 12 Januari 2013, Pukul 13.00 WIB).

Pendapat Ibu EH menekankan bahwa kesetaraan gender ditekankan pada penempatan porsi serta proporsi bagi perempuan dalam organisasi Muhammadiyah. Penempatan porsi yang seimbang ini tentunya akan memberikan arti tentang kesetaraan gender di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Pandangan mengenai kesetaraan gender ini tentunya menjadi modal dasar bagi perempuan Muhammadiyah untuk terus berperan aktif dalam Muhammadiyah. Selain dari pendapat Ibu EH juga dari Ibu BA yang menyatakan bahwa: “kesetaraan gender disini adalah mampu menempatkan diri sesuai dengan porsinya dalam hal ini di persyarikatan Muhammadiyah” (Wawancara dengan Ibu BA tanggal 12 Januari 2013, Pukul 16.00 WIB). Pernyataan Ibu BA juga sama seperti yang diungkapkan oleh Ibu EH bahwa menurut pandangan Aisyiyah kesetaraan gender mampu menempatkan diri sesuai porsi yang seharusnya diterima dan sesuai dengan hak.

Pandangan mengenai kesetaraan gender juga terlihat pada setiap aktivitas- aktivitas dan kegiatan yang dilakukan. Menurut Aisyiyah terutama pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta kesetaraan gender merupakan hal yang melingkupi seluruh kegiatan dalam persyarikatan Muhammadiyah. Ibu ZN berpendapat demikian:

“selalu aktif dan menjadi partner dalam kegiatan Muhammadiyah, misalnya saat ada Mukatamar tahun kemaren kami dilibatkan ya walau tidak secara mutlak mas, sehingga bisa dikatakan kami pun ikut berperan dalam hal tersebut, selain itu saat milad pun kami juga ikut” (Wawancara dengan Ibu ZN tanggal 1 Februari 2013, Pukul 13.00 WIB).

Menurut pandangan Ibu ZN bahwa pandangan kesetaraan gender yang ada menurut Aisyiyah yaitu tatkala ada kegiatan seperti Milad dan Mukatamar. Pada kegiatan- kegiatan tersebut Aisyiyah terutama Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta ada yang dilibatkan namun melalui perwakilan yaitu pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Selain Ibu ZN, ada juga pendapat dari Ibu SS, yaitu sebagai berikut:“selalu berkolaborasi dalam setiap kegiatan- kegiatan yang ada sehingga kita selalu aktif dalam seluruh kegiatan Muhammadiyah misalnya ada tanwir Muhammadiyah, dan kegiatan yang lain, pasti kami di ikutkan” (Wawancara dengan Ibu SS tanggal 4 Januari 2013, Pukul 13.30 WIB).

Menurut Ibu SS bahwa kesetaraan gender bisa dilihat kolaborasi kegiatan- kegiatan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Aisyiyah. Menurut Ibu SS sendiri kesetaraan gender ini dilihat dari keikutsertaan setiap anggota maupun pengurus yang ada pada Aisyiyah terutama pada lingkungan Pimpinan Daerah Aisyiyah.

Dari berbagai pendapat diatas bahwa kesetaraan gender dalam pandangan Aisyiyah adalah bagaimana mampu menempatkan porsi yang

sesuai untuk dapat berkiprah dalam setiap agenda atau kegiatan Muhammadiyah. Pemeberian porsi khusus ini akan menambah pengalaman dan wawasan kader terutama kader Aisyiyah dalam wadah organisasi secara luas yaitu Muhammadiyah.

Pandangan gender ini merupakan bagain dari peranan kesetaraan gender dalam organisasi Muhammadiyah. Pandangan gender ini nantinya yang akan menjadi modal bagi perempuan terutam pada lingkup Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta yang selama ini dirasa begitu sulit untuk dapat masuk atau berperan langsung dalam organisasi Muhammadiyah walaupun melalui keterwakilan.

3. Program-Program Kesetaraan Gender Pada Aisyiyah Kota Yogyakarta

Program kerja merupakan hal terpenting dalam setiap organisasi dimanapun berada. Keberadaan program kerja dalam suatu organisasi ibaratkan menjadi nyawa untuk menjaga keberlangsungan organisasi tersebut. Program kerja dari setiap organisasi tentunya disesuaikan dengan kondisi serta situasi organisasi, tentunya agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan.

Program-program yang ada pada Aisyiyah dalam hal ini Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta terdapat program- program yang

berkesetaraan gender. Program tersebut ada karena kebutuhan akan peran dalam kesetaraan gender yang bersangkutan dengan Muhammadiyah pada khususnya dan dalam masyarakat secara luas pada umumnya. Program-program kesetaraan gender yang terdapat pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta bertujuan guna mendidik para kader, pengurus, serta anggota guna menanamkan pendidikan kesetaraan gender agar mereka dapat mempunyai wawasan gender sehingga peran mereka dalam organisasi Muhammadiyah dapat maksimal. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu WAM, yaitu sebagai berikut:

“semua program telah *include* menjadi satu, seperti adanya konsolidasi kelembagaan dimana didalamnya terdapat penguatan peran serta fungsi Aisyiyah sebagai gerakan perempuan Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang dakwah dan peningkatan posisi dan peran Aisyiyah sebagai kekuatan strategis masyarakat sipil dan memberikan kontribusi dinamika perempuan dalam Muhammadiyah dan Kota Yogyakarta pada khususnya. Sebenarnya masih ada lagi mas, tapi yang saya tonjolkan dari konsolidasi kelembagaan saja” (Wawancara dengan Ibu WAM tanggal 8 Desember 2012, Pukul 13.45 WIB).

Pendapat Ibu WAM menyatakan bahwa program- program yang ada pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta sendiri bertujuan untuk meningkatkan peran Aisyiyah untuk memberikan kontribusi dalam Muhammadiyah dan Kota Yogyakarta. Dari pendapat Ibu WAM, bahwa setiap program yang ada pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta telah berkesetaraan gender. Program ini ditujukan sebagai

langkah guna memberikan kemudahan kepada anggota, pengurus serta kader Aisyiyah terutama pada lingkungan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta untuk bisa berperan secara aktif dalam Muhammadiyah dalam hal ini pada tataran Kota Yogyakarta. Namun secara luasnya nanti akan mampu berperan dalam Muhammadiyah tingkat pusat.

Program- program yang ada pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta tidak hanya pada penguatan kelembagaan serta ideologi, namun program-program tersebut ada terdapat pada penguatan yang lain seperti pada Majelis-Majelis yang ada pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh ibu SB, yaitu sebagai berikut: “ya ada, yaitu dari Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu telaah PERDA perspektif gender” (Wawancara dengan Ibu SB tanggal 8 Desember 2012, pukul 14.30 WIB).

Berdasarkan pendapat dari Ibu SB, bahwa program yang ada pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta ada pada Majelis Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melakukan telaah Perda yang berperspektif gender. Telaah mengenai perda gender ini untuk mencermati perda tersebut untuk diidentifikasi serta ditindaklanjuti. Telaah ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana perda yang berkesetaraan gender. Dengan adanya telaah ini maka akan menjadikan acuan bagi perempuan Muhammadiyah pada lingkungan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota

Yogyakarta untuk dapat berkiprah pada Muhammadiyah. Telaah PERDA ini akan memberikan pendidikan bagi perempuan Aisyiyah khususnya pada lingkungan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta untuk berkiprah secara aktif dalam bidang politik, kepemimpinan, serta HAM. Dengan Telaah PERDA ini memungkinkan peran kesetaraan gender yang proporsional.

Program- program yang ada pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta secara keseluruhan telah berkesetaraan gender. Selain program yang bersifat pengembangan seperti yang dijelaskan oleh informan diatas juga terdapat program inti, program- program tersebut meliputi program pendidikan politik, program pendidikan kepemimpinan, dan program pendidikan HAM. Keseluruhan program pendidikan tersebut telah ada dan menjadi satu dengan program kerja majelis. Melalui berbagai pendidikan yang diberikan oleh Aisyiyah kepada anggota dan kader untuk berkiprah di Muhammadiyah. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu EH, yaitu sebagai berikut: “Ada, dan itu sudah ada dalam setiap Majelis serta dalam program kerja Aisyiyah sendiri untuk mendidik para kader, anggota, serta pengurus untuk memperoleh pendidikan berkesetaraan gender”(Wawancara dengan Ibu EH tanggal 12 Januari 2013, Pukul 15.00 WIB).

Pelaksanaan program- program pendidikan yang dilakukan oleh Aisyiyah Kota Yogyakarta seperti pendidikan politik, kepemimpinan serta HAM memberikan peran yang proporsional kepada perempuan Muhammadiyah, seperti menjadi saksi dalam PILKADA, PEMILU, serta secara aktif ikut serta pada pencalonan legislatif. Selain itu juga dengan memberikan pendidikan kepemimpinan dan HAM maka perempuan Muhammadiyah akan mengetahui tentang hak nya dalam organisasi Muhammadiyah serta untuk melatih kepemimpinan perempuan Muhammadiyah. Dengan adanya pendidikan serta pelatihan yang diberikan tersebut sedikit demi sedikit peranan perempuan Muhammadiyah dapat meluas yaitu di sektor politik dan mampu untuk memimpin.

Selain itu, Berdasarkan pendapat ibu LST bahwa program yang ada pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta yang utama adalah penguatan ideologi, penguatan kelambagaan hal ini diterapkan agar seluruh anggota, pengurus, serta kader mempunyai keyakinan yang kuat serta pengetahuan yang luas mengenai gender. Penguatan ini juga sebagai dasar bagi perempuan Muhammadiyah agar bisa secara aktif berperan di Muhammadiyah. Selain dari Ibu LST ada juga pendapat Ibu NA, yaitu sebagai berikut:

“Ada, dan itu sudah ada pada setiap Majelis seperti pada Majelis Pendidikan yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM. Program kerja ini sasarannya tidak hanya pengurus Majelis Dikdasmen, tetapi keseluruhan pengurus serta anggota PDA Kota Yogyakarta. Penguatan ini sebenarnya untuk menciptakan kader serta calon pemimpin yang tangguh serta cakap”(Wawancara dengan Ibu NA tanggal 14 Desember 2012, Pukul 14.35 WIB).

Dari pendapat Ibu NA diatas bahwa program- program kesetaraan gender Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta terlihat pada Majelis Pendidikan yaitu dengan penguatan kualitas serta kompetensi SDM agar tercipta kualitas kader, anggota serta pengurus yang mempunyai jiwa pemimpin. Pernyataan Ibu NA tentang program tersebut memberikan fasilitas terkait dengan penguatan SDM untuk dapat berperan secara aktif di persyarikatan Muhammadiyah. Selain dari Ibu NA, pendapat terhadap program- program Aisyiyah yang berkesetaraan gender juga dikemukakan oleh beliau, yaitu sebagai berikut: “ada mas, semua program dari Aisyiyah terkait dengan kesetaraan gender, yang itu sudah tercantumkan dalam POKJA masing- masing majelis”(Wawancara dengan Ibu SS tanggal 4 Januari 2013, Pukul 13.30 WIB).

Dari pendapat Ibu SS bahwa program kesetaraan gender Aisyiyah Kota Yogyakarta sudah tercantum dalam setiap POKJA di masing- masing majelis. Dengan tercantumkannya POKJA pada masing- masing majelis maka program kesetaraan gender yang terdapat pada Pimpinan

Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta maka program ini semuanya sudah berkesetaraan gender. Program kesetaraan gender Aisyiyah Kota Yogyakarta ditunjukkan dengan berbagai program- program kegiatan yang pada hakekatnya untuk membimbing serta memberikan pengetahuan kepada para anggota, kader, serta pengurus terhadap peran perempuan di Muhammadiyah pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.

Berdasarkan pendapat informan diatas terkait dengan program- program Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa keseluruhan program yang ada pada dasarnya telah mengedepankan kesetaraan gender. Program ini dirancang agar setiap anggota, pengurus, serta kader Aisyiyah dapat mempunyai kecakapan serta tangguh sebagai kader perempuan Muhammadiyah. Dengan adanya program tersebut maka peran Aisyiyah dalam kesetaraan gender di organisasi menjadi maksimal. Program- program yang berkesetaraan gender tersebut secara tidak langsung sebagai alat untuk membantu perempuan khususnya pada Aisyiyah Kota Yogyakarta untuk terus berpartisipasi secara aktif dalam persyarikatan Muhammadiyah.

Melalui program tersebut diharapkan peranan perempuan dalam organisasi Muhammadiyah semakin maksimal sehingga memutuskan pandangan gender dan subordinasi yaitu perempuan bersifat irrasional dan tidak bisa untuk memimpin. Dengan adanya program tersebut paling tidak

menumbuhkan adanya kemauan dari perempuan Muhammadiyah terutama pada lingkungan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta untuk bisa berperan aktif dalam setiap kegiatan atau agenda Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Dengan adanya program pendidikan yang diberikan oleh Aisyiyah Kota Yogyakarta seperti pendidikan politik, pendidikan kesetaraan gender, pendidikan kepemimpinan, serta pendidikan HAM memberikan kontribusi besar bagi peranannya di dalam Muhammadiyah untuk menjadi pengurus secara aktif serta dalam keikutsertaan pada perpolitikan. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu BA, yaitu sebagai berikut:

“selain itu juga ada pendidikan politik, pendidikan kepemimpinan untuk para kader, anggota serta pengurus Aisyiyah Kota Yogyakarta, sehingga mereka tidak lagi canggung untuk tampil di depan, seperti sekarang ini ada dari pihak kami yang menjadi anggota legislatif, dan duduk sebagai anggota di Muhammadiyah Kota” (Wawancara dengan Ibu BA tanggal 12 Januari 2013, Pukul 16.00 WIB).

Program- program yang ada pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta dapat dilihat dari perspektif feminisme, dimana feminisme radikal lah yang berperan. Feminisme radikal memberikan gambaran mengenai bagaimana perempuan ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Program-program kesetaraan gender yang ada pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta tersebut dapat dilihat menggunakan pendekatan fungsional struktural Parson yaitu *Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*. *Adaptation* menerangkan bahwa sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Program-program kesetaraan gender yang ada pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta telah menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada kader serta anggota Aisyiyah Kota Yogyakarta berupa pendidikan HAM, pendidikan Politik, dan sebagainya.

Goal attainment yaitu sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Program-program yang berkesetaraan gender pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta seperti pendidikan HAM, pendidikan politik, dan pendidikan kesetaraan gender yang tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada kader dan anggota Aisyiyah Kota Yogyakarta agar peluang mereka dapat ikut menjadi kepengurusan di Muhammadiyah menjadi semakin lebih terbuka.

Integration menjelaskan bahwa sistem harus mengatur antar bagian-bagian yang menjadi komponennya. Program kesetaraan gender yang ada pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta mengatur bagi

anggota serta kader Aisyiyah untuk memberikan pendidikan bagi mereka untuk ikut aktif dalam kepengurusan Muhammadiyah.

Latency menjelaskan bahwa sistem harus memelihara, memperbaiki, baik memotivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Pemeliharaan pola pada program kesetaraan gender yang ada pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta yaitu dengan memberikan pendidikan HAM, pendidikan politik serta pendidikan kesetaraan gender untuk memberikan pembelajaran tentang gender secara berkesinambungan sehingga kesetaraan gender antara Aisyiyah dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta dapat berjalan secara proporsional.

4. Peran Kesetaraan Gender Aisyiyah di Organisasi Muhammadiyah

Kesetaraan gender merupakan kondisi dimana perbandingan antara laki- laki setara dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dalam setiap aktifitas kehidupan sehari. Kesetaraan gender ini pun tentunya terdapat peran yang akan dijalankan baik antara laki- laki maupun perempuan. Peran ini akan membawa seseorang pada kegiatannya sehari- hari sebagai individu dalam masyarakat. Peran kesetaraan gender adalah peran dimana perempuan Muhammadiyah dapat memperoleh akses serta kontrol dalam kehidupan organisasi Muhammadiyah. Peran kesetaraan gender dapat

dilihat dari setiap kegiatan atau agenda Muhammadiyah serta keterlibatan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan.

Peran kesetaraan gender Aisyiyah dalam organisasi Muhammadiyah dapat dijelaskan oleh beberapa pendapat dari informan berikut, yaitu dari Ibu HS sebagai berikut: “Aisyiyah merupakan organisasi perempuan persyarikatan Muhammadiyah yang statusnya adalah otonom khusus. Sehingga seluruh anggota dan kegiatan amal usaha lainnya sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah” (Wawancara dengan Ibu HS tanggal 8 Desember 2012, Pukul 13.30 WIB).

Berdasarkan pendapat Ibu HS dapat dilihat bahwa segala kegiatan yang ada pada Aisyiyah terutama pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta telah otonom, artinya seluruhnya sudah berkesetaraan gender karena Aisyiyah sendiri merupakan organisasi otonom khusus Muhammadiyah. Dengan adanya kewenangan khusus ini maka segala aktivitas yang ada merupakan wujud dari peran kesetaraan gender.

Peran kesetaraan gender ini menunjukkan bahwa perempuan Muhammadiyah khususnya pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta mampu untuk berkontribusi secara maksimal pada Muhammadiyah. Selain itu juga ada pendapat dari Ibu LST, yaitu sebagai berikut: “Sebagai mitra yang selalu merespon kegiatan Muhammadiyah, Aisyiyah selalu dilibatkan dalam kegiatan Muhammadiyah, baik secara

aktif maupun pasif’ (Wawancara dengan Ibu LST tanggal 14 Desember 2012, Pukul 13.40 WIB).

Menurut pendapat Ibu LST bahwa peran perempuan terutama pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta sebagai mitra dalam setiap kegiatan Muhammadiyah hal ini dapat dilihat dari keterlibatan perempuan Muhammadiyah terutama dalam setiap kegiatan. Kegiatan ini tentunya pada tataran Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Dengan adanya keterlibatan ini maka peranan Aisyiyah dalam kesetaraan gender di Muhammadiyah dapat lakukan baik secara aktif maupun pasif. Peran dalam setiap kegiatan juga dapat dilihat menurut pendapat dari Ibu NA, yaitu sebagai berikut: “selalu aktif dalam kegiatan Muhammadiyah” (Wawancara dengan Ibu NA tanggal 14 Desember 2012, Pukul 14.35 WIB). Menurut Ibu NA, keaktifan Aisyiyah dalam Muhammadiyah dapat dilihat dari keikutsertaan para anggota serta pengurus dalam kegiatan tersebut. Keikutsertaan tersebut dapat terlihat dari jumlah orang yang ikut dalam setiap kepanitiaan dan yang menduduki dalam panitia inti tersebut. Keikutsertaan ini dapat dilihat sebagai peran kesetaraan gender. Selain pada kegiatan- kegiatan yang diadakan juga ada pada pengambilan keputusan.

Peran kesetaraan gender dilihat dari segi pengambilan keputusan sejauh mana peran perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Adapun mengenai keterlibatan ini akan di jelaskan oleh beberapa informan berikut yaitu Ibu LST, sebagai berikut:

“ya, dengan selalu diberikan porsi khusus untuk Aisyiyah. Kebijakan serta arah gerakan Muhammadiyah didasarkan atas seluruh pendapat dari semua anggota persyarikatan Muhammadiyah dalam setiap rapat pleno serta musyawarah yang ada, sehingga semua dapat menyatakan pendapat, itulah mengapa dari Aisyiyah harus diberikan porsi khusus” (Wawancara dengan Ibu LST tanggal 14 Desember 2012, Pukul 13.40 WIB).

Dari pendapat Ibu LST bahwa dengan pemberian porsi khusus bagi Aisyiyah sangat berguna untuk dapat berperan aktif di Muhammadiyah, menurut pendapat Ibu LST arah gerakan dari Muhammadiyah juga berasal dari seluruh pendapat dari semua anggota. Dengan adanya pemberian porsi khusus ini maka peranan Aisyiyah Kota Yogyakarta terutama dalam tataran Muhammadiyah Kota Yogyakarta dapat dijalankan dengan aktif secara keseluruhan. Selain Ibu LST juga ada pendapat dari Ibu RI, yaitu sebagai berikut: “ya, dengan porsi khusus yang diberikan, misalnya saja saat rapat pleno dari pihak kami ada yang ikut dalam pengambilan keputusan, sehingga pendapat kami diperhatikan” (Wawancara dengan Ibu RI tanggal 4 Januari 2013, Pukul 15.35 WIB).

Berdasarkan pendapat Ibu RI bahwa dengan pemberian porsi khusus terutama pada saat rapat pengambilan keputusan menunjukan

bahwa peran kesetaraan gender Aisyiyah Kota Yogyakarta dalam organisasi Muhammadiyah sudah dapat diimplementasikan walaupun masih belum maksimal. Dengan adanya pemberian porsi ini maka perempuan Muhammadiyah dapat maksimal dalam berbagai kegiatan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah pendapat Ibu EH, yaitu sebagai berikut: “dengan ikut dalam setiap rapat pengambilan keputusan, walaupun itu hanya perwakilan saja” (Wawancara dengan Ibu EH tanggal 12 Januari 2013, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan pernyataan Ibu EH bahwa peran kesetaraan gender dilihat dari setiap rapat pengambilan keputusan sehingga disini peran perempuan Muhammadiyah dapat dikatakan sudah bisa maksimal, walaupun masih juga ada keterwakilan. Pendapat Ibu EH diperkuat oleh Ibu BA, yaitu sebagai berikut: “Dengan ikut dalam setiap rapat pengambilan keputusan, walaupun itu hanya perwakilan saja dan tidak semua”(Wawancara dengan Ibu BA tanggal 12 Januari 2013 Pukul 16.00 WIB). Menurut, pendapat Ibu BA bahwa keikutsertaan perempuan Muhammadiyah dalam pengambilan keputusan masih melalui perwakilan artinya tidak seluruhnya ikut dalam pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian maka peran kesetaraan gender dalam organisasi Muhammadiyah sudah bisa dikatakan setara namun belum maksimal

karena memang budaya dari Muhammadiyah sendiri yang masih begitu kental patriarkhinya.

Selanjutnya adalah pendapat dari Ibu ZN tentang peran perempuan Muhammadiyah yang menjadi anggota Aisyiyah dalam pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut: “Dengan ikut serta dalam berbagai agenda rutin Muhammadiyah terutama saat pengambilan keputusan” (Wawancara dengan Ibu ZN tanggal 1 Februari 2013 pukul 13.00 WIB). Berdasarkan pendapat Ibu ZN bahwa peran perempuan Muhammadiyah saat pengambilan keputusan adalah dengan ikut serta dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan ini berarti menunjukkan bahwa peran kesetaraan gender Aisyiyah pada organisasi Muhammadiyah bisa dikatakan cukup maksimal.

Peran kesetaraan gender Aisyiyah Kota Yogyakarta berdasarkan pendapat di atas terlihat pada setiap pengambilan keputusan serta menjadi mitra dalam setiap kegiatan baik itu dalam kegiatan dakwah maupun dalam kegiatan sosial, selain itu juga ada dari anggota Aisyiyah Kota Yogyakarta yang menjadi staff pada Majelis DIKDASMEN di Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kesetaraan Gender Aisyiyah dalam Organisasi Muhammadiyah

Dalam menjalankan setiap kegiatan, agenda, atau kebijakan tentunya terdapat faktor- faktor baik itu pendukung maupun penghambat. Pada peran kesetaraan gender Aisyiyah Kota Yogyakarta dalam organisasi Muhammadiyah terdapat beberapa faktor baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung Peran Kesetaraan Gender Aisyiyah dalam Organisasi Muhammadiyah

Setiap kegiatan yang direncanakan oleh suatu kelompok menghendaki kontribusi dari anggota kelompok demi suksesnya kegiatan tersebut. Begitu pula dengan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta menuntut agar para anggota, pengurus, serta kader dan segenap elemen di dalamnya untuk terus berpacu guna memajukan Aisyiyah khususnya Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta dan Muhammadiyah pada umumnya, hal inilah yang menjadikan faktor pendukung guna memajukan organisasi. Faktor pendukung ini tidak serta merta muncul begitu saja, namun muncul karena adanya hal- hal yang sering dilakukan sehingga dapat memunculkan faktor pendukung tersebut:

“ya ada mas, karena kita kan organisasi otonom sehingga faktor pendukung itu pasti ada., seperti saat di Muhammadiyah sedang ada agenda besar atau kegiatan apalah itu, pasti kita dilibatkan, dan

sekarang kan keterwakilan dari pihak kita ada yang menjabat atau duduk di Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sehingga saya rasa itu juga termasuk dari implikasi peran kesetaraan gender” (Wawancara dengan Ibu LST tanggal 14 Desember 2012 pukul 13.40 WIB).

Berdasarkan pendapat Ibu LST bahwa faktor pendukung peran kesetaraan gender yaitu dimana perempuan dilibatkan dalam setiap agenda Muhammadiyah, baik itu dalam jabatan struktural maupun dalam kepanitiaan di dalam agenda atau kegiatan Muhammadiyah. Selain pendapat dari Ibu LST juga ada pendapat dari Ibu SB, yaitu sebagai berikut:

“Faktor pendukungnya Surat An- Nahl ayat 97, yang mana perempuan mempunyai hak yang sama atas laki- laki dan perempuan. Dengan surat An- Nahl tersebut maka perjuangan guna mempertahankan nilai islam dalam Aisyiyah dan Muhammadiyah akan terus terjaga, serta dalam akses menduduki jabatan dalam struktur Muhammadiyah” (Wawancara dengan Ibu SB tanggal 8 Desember 2012, pukul 14.30 WIB).

Dari pendapat Ibu SB faktor pendukungnya terletak pada surat An- Nahl ayat 97 yang menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama atas laki- laki dan perempuan. Dengan apa yang ada dalam surat An- Nahl ayat 97 ini maka dapat dijadikan faktor pendukung bagi kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Kesempatan serta akses bagi perempuan agar dapat menjalankan perannya di Muhammadiyah sesuai dengan kapasitasnya serta kemampuannya. Hal ini serupa juga diungkapkan oleh Ibu ZN, yaitu:

“ada mas, kami mempunyai kemampuan tentang manajerial dan pengetahuan tentang peraturan organisasi sehingga kamipun berhak untuk berperan dalam jabatan di persyarikatan Muhammadiyah, selain itu juga ada sebagian dari mereka yang ada di Muhammadiyah mendukung kami guna berperan aktif” (Wawancara dengan Ibu ZN tanggal 1 Februari 2013, pukul 13.00 WIB).

Dari pendapat Ibu ZN bahwa faktor pendukungnya adalah kemampuan tentang manajerial organisasi yang menjadi kelebihan, sehingga dapat memudahkan bagi perempuan Muhammadiyah khususnya di lingkungan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta untuk masuk ke dalam struktur Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Selain pendapat Ibu ZN, pendapat Ibu RI, yaitu sebagai berikut: “ada mas, dari pihak Muhammadiyah sendiri selalu memberikan akses kepada kami untuk terus meningkatkan kemampuan diri” (Wawancara dengan Ibu RI tanggal 4 Januari 2013 pukul 15.35 WIB).

Berdasarkan pendapat dari Ibu RI bahwa faktor pendukung dari peran kesetaraan gender adalah adanya akses dari Muhammadiyah untuk terus meningkatkan kemampuan diri. Kemampuan diri ini dapat ditunjukkan dengan aktif di berbagai kegiatan Muhammadiyah, misalnya pada saat ada kegiatan Tanwir, Milad, Muktamar. Dengan mengikuti setiap agenda dari Muhammadiyah tersebut maka akan semakin mengasah kemampuan diri mereka sehingga dengan

kemampuan diri tersebut akan mendukung peran kesetaraan gender.

Pendapat berikutnya juga dating dari Ibu SS yaitu sebagai berikut:

“Untuk pendukungnya ada mas tentunya, seperti saat muktamar Muhammadiyah tahun 2010 kemaren, kita diikutkan ada yang menjadi koordinator untuk mengurus legalisasi, walaupun hanya menjadi bendahara dan sekretaris, tapi paling tidak ada dari pihak kita yang ada disana walaupun itu adalah ranahnya laki- laki” (Wawancara dengan Ibu SS tanggal 4 Januari 2013 pukul 13.30 WIB).

Berdasarkan pendapat Ibu SS bahwasanya faktor pendukung tersebut datang dari peran perempuan Muhammadiyah dalam setiap kegiatan Muhammadiyah seperti Milad, Muktamar dimana peran perempuan tersebut dapat dilihat dari keaktifan dalam agenda tersebut seperti ada yang menjadi koordinasi legalisasi, dan kepanitiaan yang lainnya, yang mana hal tersebut merupakan sesuatu yang dikerjakan oleh laki- laki.

Kesempatan serta akses perempuan Muhammadiyah dalam setiap agenda Muhammadiyah sangat potensial, sehingga menunjang adanya peran kesetaraan gender. Dari pendapat atau pernyataan diatas jika kita analisis dengan gerakan kesetaraan gender yaitu adanya akses, kontrol, partisipasi serta manfaat dalam setiap aktifitas terutama dalam organisasi. Faktor pendukung peran kesetaraan gender ini akan mendapatkan partisipasi, Kontrol, serta akses untuk dapat duduk dalam

organisasi Muhammadiyah dalam hal ini di Kota Yogyakarta. Dengan adanya faktor pendukung ini maka akan terjadi peran gender yang proporsional antara laki- laki dan perempuan dalam persyarikatan Muhammadiyah. Adanya faktor pendukung ini maka akan memberikan dampak yang positif bagi perempuan Muhammadiyah.

b. Faktor Penghambat Peran Kesetaraan Gender Aisyiyah dalam Organisasi Muhammadiyah

Egalitarianisme yang bertumpu pada asas persamaan dan kesetaraan merupakan salah satu pilar pembangunan masyarakat madani. Diantara problem yang menghambat terwujudnya masyarakat yang egaliter adalah terjadinya ketidakadilan gender. Sampai sekarang, ketidakadilan gender merupakan masalah internasional yang belum terselesaikan.

Keterlibatan mental serta emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mana menghendaki adanya kontribusi dan tanggung jawab terhadap tujuan kelompok memang sangat dibutuhkan. Keterlibatan emosi serta mental seseorang tersebut terkadang dapat menjadikan salah satu faktor penghambat dalam sebuah organisasi. Sejalan dengan hal tersebut apabila dikaitkan dengan ketidakadilan gender maka dapat dilihat dalam gender dan kepemimpinan. Pandangan gender dan kepemimpinan berasumsi bahwa Sejumlah

laki- laki dalam manajemen senior menciptakan sebuah *image* yang menjurus pada pengabdianya sendiri (*Self pertaining*).

Berdasarkan pernyataan diatas diperkuat dengan pendapat Ibu HS yaitu sebagai berikut: “ Faktor penghambat sebenarnya tidak ada, yang ada hanyalah perempuan membatasi diri”.(Wawancara dengan Ibu HS tanggal 8 Desember 2012 pukul 13.30 WIB). Berdasarkan pendapat dari Ibu HS dapat dilihat bahwa masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan peran kesetaraan gender dalam organisasi Muhammadiyah. Adanya perempuan yang membatasi diri berarti secara tidak langsung mengarah kepada adanya anggapan bahwa laki- laki yang pantas untuk menjadi pemimpin sedangkan perempuan kurang untuk memimpin. Hal ini sejalan dengan asumsi bahwa laki- laki dalam manajemen senior menciptakan sebuah *image* yang menjurus pada pengabdianya sendiri.

Dengan adanya asumsi tersebut maka peran laki- laki sangatlah dominan dalam organisasi, sehingga perempuan merasa enggan dan kurang mampu untuk memimpin. Selain itu, menurut Ibu WAM tentang faktor penghambat adalah sebagai berikut: “sebenarnya bukan penghambat, namun memberi kesempatan kepada laki-laki karena daya jangkau yang luas, namun bila ternyata ada perempuan yang *capable* guna memimpin ke depan itu bukan masalah” (Wawancara dengan Ibu WAM tanggal 8 Desember 2012 pukul 13.45 WIB).

Berdasarkan pendapat dari Ibu WAM bahwa perempuan Muhammadiyah khususnya dalam Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta memberikan kesempatan terhadap laki- laki karena mempunyai daya jangkau yang luas, hal ini tentunya secara tidak langsung telah menimbulkan *stereotype* kepada perempuan bahwa mereka tidak mempunyai daya jangkau luas guna menjalankan organisasi.

Asumsi gender dan *stereotype* menerangkan bahwa pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan negatif juga dapat dilakukan atas dasar anggapan gender. Namun sering kali pelabelan negatif ditimpakan kepada perempuan. Dari asumsi tersebut maka pelabelan tersebut akan terus terjadi dan tidak maksimalnya peran kesetaraan gender. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu BA, yaitu sebagai berikut: “ penghambatnya kami kurang percaya diri dan masih membatasi diri, itu kan ranahnya laki- laki sehingga kami ya mengikuti saja” (Wawancara dengan Ibu BA tanggal 12 Januari 2013 pukul 16.00 WIB).

Ibu BA berpendapat bahwa rasa percaya diri masih menjadi faktor besar mereka dalam menjalankan perannya dalam

Muhammadiyah sehingga mereka merasa canggung untuk berpartisipasi dalam persyarikatan Muhammadiyah. Adanya rasa percaya diri ini maka peranan mereka di Muhammadiyah menjadi terhambat, dan kurang maksimal. Pendapat diatas diperkuat oleh Ibu NA, yang berpendapat sebagai berikut: “ kurangnya rasa percaya diri yang dimiliki sehingga kami juga merasa enggan untuk duduk dalam struktur Muhammadiyah” (Wawancara dengan Ibu NA tanggal 14 Desember 2012 pukul 14.35 WIB).

Dari pendapat Ibu NA dapat diketahui bahwa rasa percaya diri yang kurang dari perempuan di Aisyiyah terutama pada lingkungan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta menyebabkan mereka enggan untuk duduk dalam struktur organisasi Muhammadiyah. Dari adanya rasa kurang percaya diri ini dapat menumbuhkan adanya sikap enggan untuk berperan dalam struktur Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

Selain itu juga ada pendapat dari Ibu RI, yaitu sebagai berikut: “sebetulnya bukan faktor penghambat juga, tapi kita hanya sekedar menghormati laki- laki karena mereka kaum yang dapat memimpin sehingga kami mengikuti kebijakan dari mereka” (Wawancara dengan Ibu RI tanggal 4 Januari 2013 pukul 15.35 WIB).

Rasa penghormatan terhadap laki- laki merupakan hal yang menjadikan salah satu penyebab faktor penghambat peran kesetaraan gender. Mereka atau perempuan Muhammadiyah masih sangat mengikuti kebijakan yang ditentukan oleh kaum laki- laki dalam Muhammadiyah. Mereka masih merasa kurang percaya diri untuk dapat duduk berperan secara aktif dalam Muhammadiyah. Selanjutnya adalah pendapat dari Ibu SS, yaitu sebagai berikut:“Sebenarnya bukan penghambat, apa yah istilahnya itu, kita hanya menghormati laki- laki untuk memimpin dan kita pun juga membatasi diri, karena kita kan hanya perempuan dan masih ada yang lebih pantas untuk memimpin” (Wawancara dengan Ibu SS tanggal 4 Januari 2013 pukul 13.30 WIB)

Dari pendapat Ibu SS bahwa rasa penghormatan terhadap kaum laki- laki untuk memimpin masih menjadi prioritas utama sebagai penghambat peran kesetaraan gender. Rasa penghormatan ini ditunjukkan dengan cara mereka mengikuti kebijakan yang telah dibuat sehingga peran perempuan dalam Muhammadiyah kurang maksimal. Dari beberapa tanggapan diatas mengenai faktor penghambat kesetaraan gender, sesuai dengan asumsi gender dan subordinasi yang menyatakan bahwa salah satu jenis kelamin lebih utama dibandingkan jenis kelamin yang lain. Dengan adanya subordinasi dengan rasa penghormatan maka memunculkan adanya

rasa kurang percaya diri dari perempuan Muhammadiyah khususnya pada lingkungan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta guna tampil sebagai pemimpin sebagaimana yang telah disebutkan oleh informan diatas.

Walaupun mayoritas informan mengatakan bahwa hal ini bukan faktor penghambat, namun jika dilihat dari sudut pandang gender beberapa pernyataan yang informan kemukakan adalah merupakan faktor penghambat adanya rasa membatasi diri serta kurang mampu untuk tampil di depan adalah salah satu hal dari faktor penghambat. Rasa lebih menghargai dan menghormati laki- laki sebagai pemimpin dan mempunyai daya jangkau yang luas membuat perempuan Muhammadiyah dalam hal ini pada lingkungan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta merasa enggan untuk tampil sebagai pemimpin. Sehingga peran kesetaraan gender dalam organisasi menjadi terhalang atau kutang maksimal.

Adanya berbagai kebijakan serta kedudukan dalam peran kesetaraan gender Aisyiyah Kota Yogyakarta dalam organisasi Muhammadiyah maka terdapat poin- poin penting yang dilakukan oleh Aisyiyah Kota Yogyakarta atau dengan kata lain adalah solusi yang dilakukan oleh Aisyiyah Kota Yogyakarta agar kesetaraan gender tetap berjalan secara proporsional, seperti yang diungkapkan oleh Ibu

HS sebagai berikut: “ yaitu dengan membuka peluang bila ada anggota Aisyiyah yang akan memaksimalkan perannya di Muhammadiyah, namun tidak meninggalkan tugas yang ada di Aisyiyah” (Wawancara dengan Ibu HS tanggal 8 Desember 2012 pukul 13.30 WIB)

Pendapat Ibu HS menyatakan bahwa peranan atau solusi yang dilakukan Aisyiyah Kota Yogyakarta agar kesetaraan gender berjalan secara proporsional adalah dengan memberikan peluang bila ada anggota Aisyiyah yang akan memaksimalkan perannya di Muhammadiyah. Dengan memberikan peluang ini maka perempuan Muhammadiyah bisa secara maksimal untuk berperan secara aktif di Muhammadiyah. Pemberian peluang ini bisa dilakukan dengan memaksimalkan keikutsertaan mereka dalam setiap kegiatan, rapat pleno, dan lainnya. Pemberian peluang ini bisa menjadikan salah satu solusi dari Aisyiyah agar dapat menjaga kesetaraan gender secara proporsional. Selanjutnya adalah pendapat dari Ibu NA, yaitu sebagai berikut: “yaitu saling untuk menghargai diantara keduanya serta memberikan porsi yang setara dalam setiap agenda dan kegiatan” (Wawancara dengan Ibu NA tanggal 14 Desember 2012 pukul 14.35 WIB).

Berdasarkan pendapat Ibu NA bahwasanya saling menghargai dan memberikan porsi yang setara dalam setiap agenda dan kegiatan

lainnya. Dengan saling menghargai maka merupakan solusi yang dilakukan oleh Aisyiyah untuk menjaga kesetaraan gender dalam organisasi Muhammadiyah.

Selain Ibu NA ada pendapat dari Ibu SS, yaitu sebagai berikut: “dengan memadukan program- program yang ada yang itu memang saling berkaitan” (Wawancara dengan Ibu SS tanggal 14 Januari 2013 pukul 13.30 WIB). Pendapat Ibu SS menyatakan bahwa solusi yang dilakukan Aisyiyah adalah dengan memadukan program- program yang ada. Memadukkan program- program yang ada antara Aisyiyah Kota Yogyakarta dengan Muhammadiyah Kota Yogyakarta inilah yang nantinya akan mengetahui sejauh mana peran yang dijalankan oleh Aisyiyah dalam kesetaraan gender. Dengan mengambil solusi memadukkan program- program yang ada antara Aisyiyah Kota Yogyakarta dengan Muhammadiyah Kota Yogyakarta maka akan terbentuk peran perempuan Muhammadiyah yang maksimal dalam persyarikatan Muhammadiyah.

Solusi yang dilakukan Aisyiyah Kota Yogyakarta dalam peranan kesetaraan gender di organisasi Muhammadiyah juga diperkuat oleh pendapat Ibu WAM, yaitu sebagai berikut: “tetap membuka peluang bila ada anggota Aisyiyah yang perlu untuk memaksimalkan perannya di lingkungan Muhammadiyah, namun

tugas di Aisyiyah tidak ditingalkan” (Wawancara dengan Ibu WAM tanggal 8 Desember 2012 pukul 13.45 WIB).

Berdasarkan pendapat Ibu WAM bahwa solusi yang dilakukan Aisyiyah adalah dengan membuka peluang bagi anggota Aisyiyah Kota Yogyakarta untuk memaksimalkan perannya di Muhammadiyah. Peluang- peluang tersebut seperti yang telah disebutkan diatas yaitu dengan mengikutsertakan perempuan dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan dalam organisasi Muhammadiyah.

C. Pembahasan

Peran kesetaraan gender Aisyiyah dalam organisasi Muhammadiyah merupakan peran dimana perempuan Muhammadiyah dapat secara aktif ikut dalam berbagai agenda Muhammadiyah. Peran ini muncul karena adanya hak dan kewajiban yang harus diselaraskan oleh kedua organisasi tersebut baik Aisyiyah maupun Muhammadiyah. Peran kesetaraan gender Aisyiyah Kota Yogyakarta yaitu memberdayakan serta memberikan pengetahuan terkait dengan kesetaraan gender kepada setiap anggota, pengurus, serta kader.

Partisipasi serta peran perempuan dalam persyarikatan Muhammadiyah tidak hanya pada kegiatan yang bersifat secara langsung seperti Muktamar, Milad namun jauh dari pada itu adalah

bagaimana peran perempuan Muhammadiyah itu sendiri terutama pada lingkungan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta dalam pengambilan keputusan serta peran secara keseluruhan. Partisipasi peran perempuan Muhammadiyah Kota Yogyakarta belum bisa diimbangi dengan wilayah praksis sehingga masih tercipta adanya subordinasi yang di dukung oleh sistem patriarkhi yang kokoh.

Kuatnya ideologi serta idealisme yang ada telah mengaburkan makna kebebasan bagi perempuan Muhammadiyah, sehingga perempuan Muhammadiyah tidak dihadirkan sebagai perempuan namun perempuan sebagai kultur. Dengan dihadirkannya perempuan Muhammadiyah sebagai kultur dalam hal ini pada lingkungan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta maka peran kesetaraan gender menjadi tidak dapat maksimal.

Melihat adanya kultur tersebut maka dengan melalui program-program yang ada pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta mencoba untuk memberikan pengetahuan tentang kesetaraan gender kepada setiap anggota, pengurus, serta kader Aisyiyah sehingga mereka mampu untuk berkiprah dalam Muhammadiyah tanpa adanya penghalang dari sistem patriarkhi Muhammadiyah. Walaupun demikian hambatan dalam melaksanakan peran tersbut tetaplah ada.

Hambatan- hambatan tersebut terjadi karena telah mengakarnya unsur patriarkhi dalam diri mereka. Unsur tersebut telah tertanam sejak lama sehingga mereka ada yang merasa enggan untuk ikut berpartisipasi. Program- program yang dicanangkan oleh Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta untuk mendidik serta memberikan pengetahuan tentang peran kesetaraan gender berawal dari penguatan ideologi dan kelembagaan untuk membentuk kader- kader yang nantinya mampu melakukan kontribusi yang secara maksimal dalam Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan pada Muhammadiyah Pimpinan Pusat. Selain program- program inti terdapat juga program pendukung yang sudah ada dalam setiap majelis yang tujuannya sama untuk melatih para kader serta anggota untuk mempunyai pengetahuan berwawasan gender. Dengan dibekali pengetahuan tersebut maka akan timbul rasa percaya diri akan kemampuan yang dimiliki untuk berperan aktif dalam Muhammadiyah Kota Yogyakarta dalam setiap agenda.

Pelaksanaan peran kesetaraan gender Aisyiyah Kota Yogyakarta dalam organisasi Muhammadiyah akan membawa perempuan Muhammadiyah untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan atau agenda Muhammadiyah. Pelaksanaan kesetaraan gender pada persyarikatan Muhammadiyah memberikan adanya akses, partisipasi, perempuan untuk selalu bisa berperan seara aktif sehingga akan timbul

sebuah peranan yang berjalan secara proporsional dalam persyarikatan Muhammadiyah. Faktor pendukung yang menunjang peran kesetaraan gender ini adalah wawasan yang luas serta kemampuan manajerial dalam mengatur organisasi, sehingga akan sangat membantu peranan perempuan dalam organisasi Muhammadiyah. Secara keseluruhan peran kesetaraan gender Aisyiyah Kota Yogyakarta sudah menunjukkan akses, partisipasi, serta kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang ada pada Muhammadiyah.

Dari adanya kontrol tentang kebijakan tersebut maka muncul solusi yang dilakukan oleh Aisyiyah Kota Yogyakarta yaitu dengan memadukan program-program yang ada seperti dengan pendidikan politik, pendidikan kepemimpinan, serta pendidikan HAM untuk memaksimalkan peran perempuan dalam organisasi Muhammadiyah. Dengan memadukan program yang ada maka secara langsung peran perempuan Muhammadiyah terutama pada Aisyiyah Kota Yogyakarta dapat berjalan secara maksimal.

D. Pokok Temuan Penelitian

Setelah melihat berbagai pernyataan yang disebutkan dalam sub-bab sebelumnya, serta berbagai temuan-temuan yang ada dalam hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa Peran Kesetaraan Gender Aisyiyah Kota

Yogyakarta dalam Organisasi Muhammadiyah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Peran Kesetaraan Gender Aisyiyah Kota Yogyakarta dalam Organisasi Muhammadiyah dapat dilihat dari aspek kegiatan atau agenda yang diadakan oleh Muhammadiyah serta dari partisipasi perempuan dalam jabatan struktural Muhammadiyah dan keterlibatannya dalam mengeluarkan pendapat.
- b. Aisyiyah khususnya Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta merupakan mitra dari Muhammadiyah dalam setiap kegiatan.
- c. Masih adanya rasa kurang percaya diri dan membatasi diri serta adanya anggapan bahwa laki- laki mempunyai daya jangkau yang luas sehingga perempuan dalam hal ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta menjadi kurang untuk bisa mengembangkan potensi guna duduk dalam struktur Muhammadiyah dan ini merupakan sebagai faktor penghambat.
- d. Adanya akses, kontrol, serta partisipasi perempuan Muhammadiyah dalam kegiatan Muhammadiyah sebagai salah satu faktor pendorong implikasi peran kesetaraan gender Aisyiyah Kota Yogyakarta.
- e. Adanya pepaduan program- program yang ada pada Aisyiyah Kota Yogyakarta dengan Muhammadiyah Kota Yogyakarta.